



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)

Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 8 (delapan)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Kementerian Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga/BKKBN
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Selasa, 29 Oktober 2024
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara : 1. Perkenalan dari Mitra Kerja Komisi IX DPR RI
2. Penjelasan Menteri Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN mengenai Visi dan
Misi Presiden RI di Bidang Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga.
Ketua Rapat : Felly Estelita Runtuwene, S.E./Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat
Komisi IX DPR RI
Hadir : A. Anggota DPR RI
38 Dari jumlah 43 Anggota Komisi IX DPR RI
B. Pemerintah
- Menteri Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga/BKKBN; Wihaji, beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dibuka pukul 14.07 WIB setelah memenuhi kuorum sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Dalam menjalankan visi Presiden, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI/BKKBN untuk:
 - a. menyusun program 100 hari dengan indikator yang jelas dan terukur dalam mengimplementasikan visi Presiden dalam pembangunan kependudukan dan keluarga yang berkualitas;
 - b. Melakukan kolaborasi, koordinasi, dan edukasi yang intensif terkait perubahan nomenklatur dari badan menjadi kementerian, agar substansi program tetap relevan.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI/BKKBN mempertajam program kerja tahun 2025 dengan memperhatikan masukan Anggota Komisi IX DPR RI, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Penguatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, untuk percepatan capaian program Pembangunan Keluarga, termasuk memastikan jaminan kesehatan bagi penduduk usia lansia;
 - b. Bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk perluasan akses terhadap pelatihan bagi penduduk usia produktif;
 - c. Menyusun strategi konkrit dalam penguatan program kesehatan reproduksi remaja dengan mengintegrasikan isu kesehatan jiwa;
 - d. Penguatan PLKB, kader kesehatan, kader PKK dan aparatur desa untuk peningkatan kualitas pelaksanaan program prioritas pembangunan kependudukan dan keluarga, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan penggerak masyarakat.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI/BKKBN menyusun strategi yang jelas untuk melaksanakan program-program yang lebih efektif dan terintegrasi untuk mengatasi permasalahan stunting, khususnya mengembangkan basis data yang efektif dengan memperhatikan survei dan pencatatan yang akurat.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI/BKKBN untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi IX DPR RI atas Percepatan Penurunan Stunting serta melaporkan ke Komisi IX DPR RI atas pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan.

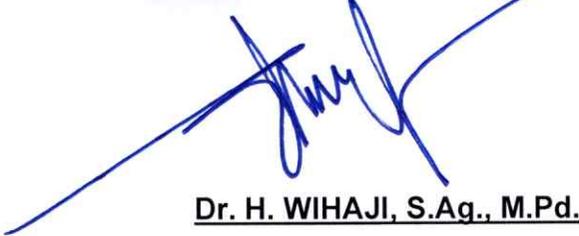
5. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI/BKKBN untuk memastikan kesejahteraan Petugas Lapangan Penanganan Stunting, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Tim Pendamping Keluarga (TPK), Kader Kesehatan dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan stunting dengan mengikutsertakan dalam program jaminan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan.
6. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI/BKKBN memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dalam Rapat Kerja hari ini untuk disampaikan ke Komisi IX DPR RI paling lambat Selasa, 5 November 2024.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.20 WIB.

Jakarta, 29 Oktober 2024

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN**



Dr. H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.

KETUA RAPAT,



FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.
A-416